

SOAL TO WAWASAN KEBANGSAAN

1. Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Namun, dalam praktiknya, banyak negara demokrasi menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, khususnya dalam pemilu. Jika Anda seorang pemimpin yang ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, strategi mana yang paling mencerminkan prinsip demokrasi sekaligus efektif?
 - A. Mengadakan kampanye massal dengan hadiah menarik bagi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara.
(cara pemberian hadiah atau *reward* biasanya berhasil, namun tidak efektif karena dilakukan atas dasar motif tertentu, ya misalnya datang ke tempat pemungutan suara hanya karena akan mendapat hadiah).
 - B. Memberikan sanksi hukum kepada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.
(cara represif biasanya berhasil namun tidak efektif. Dalam banyak kasus, cara represif dengan hukuman seperti ini hanya menimbulkan ketakutan, bukan pemahaman pentingnya partisipasi Masyarakat).
 - C. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan melalui forum diskusi publik dan survei.
(Pilihan C benar karena pada dasarnya prinsip demokrasi tidak hanya sekedar pemilihan saja, namun juga transparansi dengan melibatkan masyarakat pada berbagai kebijakan pemerintah melalui forum diskusi publik maupun survei. Melalui forum diskusi publik ataupun survei, masyarakat dapat secara bebas memilih menjadi bagian dan berpartisipasi secara efektif dalam demokrasi).
 - D. Mengurangi jumlah tempat pemungutan suara untuk meningkatkan efisiensi proses pemilu.
(Tidak ada hubungannya antara jumlah tempat pemungutan suara dengan peningkatan partisipasi masyarakat).
 - E. Menunjuk wakil rakyat tanpa pemilihan untuk mempercepat pengambilan keputusan.
(Ini jelas bukan jawaban dari peningkatan partisipasi masyarakat dengan prinsip demokrasi).
2. Salah satu tantangan dalam demokrasi adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga kebebasan berpendapat tanpa mengabaikan stabilitas sosial. Jika di sebuah negara terjadi penyebaran berita hoaks yang memicu konflik antar kelompok, langkah mana yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi untuk mengatasinya?
 - A. Membatasi kebebasan media sosial secara total untuk mencegah penyebaran hoaks.

(Pembatasan kebebasan dalam bentuk apapun justru menciderai prinsip demokrasi itu sendiri).

- B. Mendorong masyarakat untuk melaporkan berita hoaks sambil meningkatkan literasi digital.

(Jawaban ini tepat karena dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan berita hoaks sambil meningkatkan literasi digital, pemerintah tidak hanya sedang memerangi hoaks yang dapat memicu konflik itu sendiri, melainkan juga sedang mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi hoaks).

- C. Memberikan kontrol penuh kepada pemerintah untuk menyensor semua konten daring.
(Jawaban ini jelas salah, karena pengendalian kekuasaan informasi semacam ini juga tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Hadirnya pers dan media adalah untuk memberitakan kenyataan kepada masyarakat).
- D. Melarang semua diskusi publik yang bersifat kontroversial di ruang publik dan media.
(Jawaban ini juga tidak tepat, memang control terkait dengan bahasan kontroversial di ruang publik dan media bisa jadi solusi dalam mengatasi hoaks, namun dalam banyak kasus, kebijakan semacam ini malah justru menimbulkan *boomerang* karena masyarakat akan berbalik mempertanyakan transparansi pemerintah).
- E. Mengabaikan isu tersebut demi menjaga kebebasan berbicara.
(Sudah pasti ini bukan jawaban yang tepat).

3. Demokrasi menekankan pentingnya keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam situasi di mana kelompok minoritas merasa kepentingannya tidak diperhatikan dalam suatu kebijakan publik, langkah apa yang paling mencerminkan prinsip demokrasi?

- A. Meminta kelompok mayoritas untuk mendominasi keputusan tanpa konsultasi dengan minoritas.

(Jawaban ini jelas salah, karena dominasi mayoritas pada Keputusan-keputusan yang ada tanpa konsultasi dengan minoritas justru akan memecah belah bangsa. Meskipun hanya suara minoritas, namun mengabaikan suara mereka berarti mengabaikan prinsip demokrasi itu sendiri).

- B. Menyelenggarakan referendum nasional yang memungkinkan semua warga memilih.
(Referendum adalah pelibatan suara rakyat secara langsung mengenai Keputusan penting suatu negara. Sebagai contoh referendum yang pernah dilakukan pada tahun 1999 adalah Referendum Rakyat Timor Leste. Saat itu dilakukan pemungutan suara terkait nasib Timor Leste ke depannya. Referendum itu menghasilkan mayoritas masyarakat Timor Leste Merdeka dari Indonesia. Suara minoritas yang ingin tetap bergabung dengan Indonesia

tidak diambil sebagai Keputusan (meskipun nantinya ada beberapa kebijakan tambahan). Pada akhirnya Timor Leste resmi lepas pada tahun 2002. Inti dari pembahasan ini adalah, referendum bukanlah jawaban dari isu suara minoritas yang merasa kepentingannya tidak didengarkan, karena justru suara mayoritaslah yang akan selalu dipilih dalam referendum).

- C. Mengadakan dialog khusus antara pemerintah dan kelompok minoritas untuk mencari solusi bersama.

(Dengan melakukan dialog antara pemerintah dan kelompok minoritas dalam mencari solusi, menurut saya akan menjadi jawaban yang tepat. Meskipun suara minoritas tidak dieksekusi dalam hasil demokrasi, namun penting untuk mendengar kebutuhan dan kepentingan setiap pihak, terutama pihak minoritas. Setelah berdialog mendengarkan kebutuhan dan kepentingan minoritas, pemerintah nantinya diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang akan dirasa adil untuk semuanya, baik golongan mayoritas maupun golongan minoritas).

- D. Memberikan hak veto kepada kelompok minoritas dalam semua kebijakan.

(Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Ini bukan jawaban, karena tidak sesuai prinsip demokrasi. Apa gunanya melakukan demokrasi ketika suatu kebijakan yang telah diambil secara musyawarah oleh mayoritas kemudian dapat dibatalkan oleh minoritas?)

- E. Menunda kebijakan hingga semua pihak setuju tanpa batas waktu.

(Cara ini tentu saja tidak akan efektif).

- 4. Sistem hukum di Indonesia menganut asas kedaulatan hukum, yang berarti hukum menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana hukum tidak ditegakkan secara adil. Berdasarkan teori supremasi hukum, langkah apa yang paling tepat untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia?

- A. Memberikan kekuasaan lebih besar kepada lembaga eksekutif untuk mengatur penegakan hukum.

(Pemberian kekuasaan lebih besar kepada Lembaga eksekutif dalam penegakan hukum bukan jawaban yang tepat. Menurut saya, justru perlu keseimbangan kekuasaan dan kewenangan dalam penegakan hukum, baik oleh Kepolisian sebagai lembaga eksekutif, maupun oleh Kejaksaan dan pengadilan sebagai lembaga yudikatif. Kekuasaan dan kewenangan ini tidak boleh berat sebelah, dan seluruhnya saling mengawasi satu sama lain).

- B. Meningkatkan independensi lembaga peradilan dari pengaruh politik atau ekonomi.
(Independensi lembaga peradilan harus selalu ditekankan, karena pengadilan sendiri memang merupakan lembaga independent yang bebas dari intervensi pihak manapun).
- C. Mengurangi kewenangan lembaga legislatif untuk mengesahkan undang-undang baru.
(Jawabannya kurang tepat, penegakan hukum tidak hanya selalu berkaitan dengan perilaku nyata Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan dalam menguak keadilan. Namun, juga berkaitan erat dengan proses bagaimana suatu peraturan itu dibuat. Kewenangan lembaga legislatif dalam mengesahkan peraturan tidak boleh dikurangi karena sudah merupakan tugasnya).
- D. Memberikan insentif kepada aparat hukum untuk mempercepat proses hukum.
(Jawaban ini jelas salah, insentif atau hadiah belum tentu efektif dalam penegakan hukum. Juga, penegakan hukum tidak bisa disamakan dengan mempercepat proses hukum).
- E. Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding guna mempercepat penyelesaian kasus.
(Jawaban ini juga jelas salah, hak masyarakat dalam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung dijamin oleh negara dalam KUHAP. Sehingga perlu ditekankan tujuan dari penegakan hukum bukan tentang mempercepat penyelesaian kasus, namun terkait dengan bagaimana kasus dapat diselesaikan dengan adil).

Penjelasan tambahan:

Asas kedaulatan hukum di Indonesia tercantum dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) amandemen ke-3 UUD 1945. Hal ini berarti seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan sesuai dengan hukum yang ada. Salah satu bentuk implementasi dari hal ini adalah penegakan hukum yang tepat.

- 5. Dalam implementasi sistem hukum di Indonesia, sering kali terjadi kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan pelaksanaannya (*law in action*). Misalnya, meskipun korupsi dianggap sebagai kejahatan berat, kasus korupsi masih terus terjadi. Apa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan ini?
 - A. Memperbanyak peraturan baru yang lebih ketat terkait tindak pidana korupsi.
(Peraturan tidak dapat begitu saja diperbanyak atau dibuat. Peraturan harus mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, sehingga jawaban ini kurang tepat).
 - B. Meningkatkan transparansi proses hukum dan melibatkan pengawasan masyarakat.
 - C. Memberikan pengampunan bagi pelaku korupsi yang mengembalikan uang negara.

(Langkah ini malah justru bisa jadi bumerang bagi negara. Akan semakin banyak masyarakat yang korupsi, kemudian jika ketahuan akan mengembalikan uang negara agar dibebaskan, namun jika tidak ketahuan maka akan tetap melakukan korupsi).

- D. Mengurangi hukuman pidana agar pelaku korupsi lebih mudah mengakui perbuatannya. (Langkah ini tidak efektif dan justru memihak koruptor. Tidak ada yang bisa menjamin seorang koruptor akan mengakui perbuatannya jika hukuman pidananya dikurangi. Ia justru malah bisa mempermainkan hukum itu sendiri).
- E. Menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada lembaga internasional. (Ini bukan langkah atau jawaban yang tepat. Masalah korupsi adalah masalah domestik dalam negeri masing-masing negara. Setiap negara pun memiliki kebijakan masing-masing dalam menjatuhkan hukuman kepada koruptor yang disesuaikan dengan kondisi negaranya).

Penjelasan tambahan:

Kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan pelaksanaannya (*law in action*) biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Sebagai contoh karena minimnya komitmen masyarakat pada moral terkait korupsi adalah hal yang buruk. Atau juga karena banyak kecurangan terjadi dalam pelaksanaan penegakannya. Sebagai contoh koruptor yang sudah jelas salah dan diputus oleh pengadilan, menerima perlakuan istimewa di tempat penahanan, terkadang juga menerima remisi atau pemotongan masa hukuman (seperti diskon dalam rangka hari raya keagamaan, hari kemerdekaan, dan lain sebagainya). Perlakuan khusus seperti inilah yang kemudian merubah *mindset* masyarakat bahwa korupsi bukan sesuatu hal yang memalukan dan menjalani hukuman sebagai koruptor juga tidak sulit.

6. Indonesia memiliki sistem hukum yang memadukan tiga elemen utama: hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Namun, konflik sering terjadi ketika ketiganya tidak selaras dalam penerapannya, seperti pada kasus-kasus sengketa tanah adat. Langkah apa yang paling mencerminkan pendekatan demokratis untuk menyelesaikan konflik tersebut?

- A. Menghapus hukum adat agar seluruh konflik tunduk pada hukum nasional. (Jawaban ini salah, hukum adat sendiri sudah diakui dalam konstitusi negara kita. Peraturan yang Tunggal atau hanya satu tidak serta merta membuat peraturan tersebut lebih baik atau tepat. Bagaimana jika hukum nasional yang diterapkan ternyata tidak dapat menjawab masalah di beberapa daerah di Indonesia karena kebutuhannya tidak terpenuhi oleh hukum nasional? Karena seperti yang diketahui, kondisi masyarakat

Indonesia di setiap daerahnya berbeda-beda. Bisa jadi hukum adatnya sendiri adalah hukum yang paling tepat dapat menyelesaikan konfliknya).

B. Mengutamakan hukum agama sebagai solusi utama dalam penyelesaian konflik.

(Jawaban ini juga salah. Di Indonesia, hukum agama biasanya hanya mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, hak waris, perceraian, dan hak asuh anak. Masalah-masalah tersebutlah yang bisa ditangani oleh hukum agama yang biasanya akan diadili di pengadilan agama (untuk orang Islam). Pertanyaan di atas mengenai masalah sengketa tanah adat, yang merupakan masalah hukum perdata).

C. Melibatkan semua pihak terkait dalam dialog mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama.

(Dialog mediasi selalu menjadi jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat. Negara sendiri membebaskan warga masyarakatnya untuk memilih hukum yang ingin dipakai dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini, sengketa tanah adat bisa diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat, baik para pihak menginginkan sengketa diselesaikan dengan hukum nasional, maupun dengan hukum adat. Yang paling penting adalah konflik perbedaan ini dapat teratasi dan sengketa dapat diselesaikan dengan hasil yang diterima oleh seluruh pihak).

D. Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik kepada pemerintah pusat.

(Jawaban ini tidak tepat. Karena selain tidak efektif, penyerahan penyelesaian konflik kepada pemerintah pusat untuk masalah sengketa tanah adat juga tidak tepat. Indonesia sendiri sudah menganut asas desentralisasi, Dimana suatu daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur daerahnya sendiri yang tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945).

E. Mengabaikan konflik yang terjadi untuk menjaga kestabilan masyarakat.

(Mengabaikan konflik tidak akan menjamin kestabilan masyarakat, malah justru jika terus menerus diabaikan akan menjadi sangat besar dan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar lagi, misalnya munculnya Gerakan separatisme kedaerahan).

Penjelasan tambahan:

Negara Indonesia mengakui secara sah berbagai bentuk masyarakat hukum adat, dalam hal ini baik eksistensinya, maupun kebijakan atau hukum adat yang dipakai oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Oleh karena itu hukum adat diakui sebagai salah satu keragaman hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk menjamin eksistensi masyarakat hukum adatnya sendiri.

7. Masyarakat madani (*civil society*) adalah konsep yang mengacu pada masyarakat yang mandiri, memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, serta berperan aktif dalam kehidupan publik. Salah satu karakteristik masyarakat madani adalah adanya ruang publik yang bebas. Dalam konteks ini, apa peran utama ruang publik dalam mewujudkan masyarakat madani?
- A. Menjadi tempat untuk mempromosikan kepentingan pemerintah tanpa oposisi.
(Salah, kepentingan pemerintah tanpa oposisi justru menandakan iklim demokrasi yang tidak sehat di suatu negara).
 - B. Memberikan kesempatan bagi individu untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak secara damai.
(Jawaban ini benar, karena memang ruang publik yang bebas fungsinya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak secara damai).
 - C. Membatasi diskusi yang dapat menimbulkan konflik di antara anggota masyarakat.
(Pembatasan diskusi dalam bentuk apapun dengan alasan apapun termasuk ke dalam pembungkaman dan tidak sesuai dengan demokrasi yang juga sebagai salah satu ciri masyarakat madanni).
 - D. Menyediakan forum bagi pemimpin politik untuk mengatur kebijakan tanpa partisipasi masyarakat.
(Forum bagi pemimpin politik untuk mengatur kebijakan tanpa partisipasi masyarakat sudah jelas tidak transparan dan menyalahi demokrasi itu sendiri).
 - E. Mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti agenda pemerintah.
(Jawaban ini jelas salah dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan ruang publik yang bebas maupun masyarakat madani).

Penjelasan:

Ruang publik yang bebas atau *free public sphere* adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini, semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar *civil society*. Mudah-mudahan, ruang publik yang bebas ini adalah sarana bagi

seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakangnya untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Setiap orang memiliki kesempatan dan posisi yang sama dalam hal ini. Tidak ada orang yang memiliki pendapat lebih penting dibanding yang lain hanya karena status sosial atau politiknya. Di ruang publik yang bebas itu juga setiap masyarakat tidak boleh dibuat merasa takut atau diancam oleh entitas lain.



8. Dalam upaya membangun masyarakat madani di Indonesia, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip masyarakat madani?
- A. Memberlakukan aturan yang mewajibkan semua warga untuk hadir dalam forum diskusi publik.
(Jawaban ini kurang tepat karena pengambilan Keputusan publik bukanlah kewajiban warga negara, melainkan hak warga negara).
 - B. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi publik dan memberikan ruang dialog yang inklusif.
(Dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa partisipasinya dalam pengambilan Keputusan itu penting dan akan berdampak secara langsung kepada dirinya, maka diharapkan masyarakat akan sadar mengenai hal itu, dan berusaha untuk berpartisipasi pada pengambilan Keputusan publik lainnya).
 - C. Memberikan insentif finansial kepada warga yang aktif dalam diskusi publik.
(Jawaban ini salah. Pemberian hadiah atau insentif finansial sebagai *reward* memang akan berhasil namun tidak akan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan publik).
 - D. Mengurangi keterlibatan masyarakat agar proses pengambilan keputusan lebih efisien.
(Hal ini jelas salah karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi).
 - E. Mengutamakan pandangan kelompok mayoritas tanpa mempertimbangkan minoritas.

(Jawaban ini juga jelas salah. Meskipun demokrasi dalam banyak hal berarti menjalankan hasil dari suara mayoritas, namun tidak serta merta kepentingan suara minoritas diabaikan dan tidak dipertimbangkan).

9. Salah satu ciri masyarakat madani adalah adanya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Namun, di Indonesia, masih sering terjadi konflik antar kelompok yang disebabkan oleh perbedaan agama, budaya, atau pandangan politik. Apa langkah yang paling sesuai untuk membangun harmoni dalam masyarakat madani?

A. Menghapus semua bentuk keberagaman demi persatuan nasional.

(Menghapus keberagaman bukan solusi yang efektif dan belum tentu dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan keberagaman yang dimiliki suatu bangsa biasanya adalah keberagaman yang tidak bisa diubah, seperti kondisi suku, budaya, warna kulit, perbedaan fisik, dan lain sebagainya).

B. Meningkatkan dialog antar kelompok untuk saling memahami dan menghargai perbedaan.

(Dialog dengan mendengarkan seluruh pihak selalu menjadi jawaban atas segala konflik dan permasalahan yang ada. Dengan mendengarkan berbagai pihak, kita juga dapat mengetahui mengenai kondisi, kebutuhan, dan kemaupuan setiap pihak. Sehingga jika suatu kebijakan dibuat dengan dialog terlebih dahulu, maka kebijakan tersebut biasanya akan lebih menjangkau seluruh pihak dan terasa adil untuk semuanya).

C. Memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok mayoritas untuk menjaga stabilitas.

(Jawabannya jelas salah. Meskipun masyarakat madani menerapkan demokrasi, namun kelompok mayoritas tidak selalu menjadi jawaban dan prioritas).

D. Membatasi kebebasan berpendapat demi mencegah konflik di masyarakat.

(Jawaban ini jelas menyalahi demokrasi dalam masyarakat madani itu sendiri, terutama terkait dengan ruang publik yang bebas atau *free public sphere*).

E. Menghindari diskusi mengenai isu-isu sensitif yang melibatkan perbedaan.

(Menghindari masalah juga bukan solusi yang baik).

Penjelasan tambahan:

Keberagaman oleh bangsa Indonesia bisa menjadi keuntungan namun juga bisa menjadi kekurangan. Keuntungannya adalah bangsa ini menjadi salah satu bangsa dengan keunikannya. Kekurangannya adalah konflik yang dapat kapanpun terjadi dan didasari oleh banyak latarbelakang, mengingat perbedaan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perbedaan suku saja, namun juga perbedaan agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

10. Pancasila sebagai sumber nilai dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan demikian sebagai sumber nilai Pancasila memiliki makna
- A. etika dalam kehidupan remaja bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa
(Pernyataan ini kurang tepat karena hanya merujuk pada kehidupan remaja bangsa Indonesia saja).
 - B. etika pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain didunia yang sederajat
(Pernyataan ini juga kurang tepat karena ungkapan 'bangsa-bangsa lain di dunia yang sederajat'. Pernyataan ini seolah mengimplikasikan adanya bangsa yang tidak sederajat dengan bangsa Indonesia. Padahal seluruh bangsa di dunia memiliki kesetaraan yang sama baik itu negara yang maju, berkembang, maupun negara yang baru berdiri).
 - C. dasar moral tentang estetika berkaitan dengan sikap dan tingkah laku antar golongan.
(Moral estetika berarti moral keindahan, hal ini tentu tidak nyambung dengan sikap dan tingkah laku. Sikap dan tingkah laku seharusnya didasari oleh moral baik atau buruk, bukan moral estetika).
 - D. dasar moral tentang baik buruk berkaitan dengan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia
(Sejauh ini, pernyataan D adalah yang paling benar karena sumber nilai memang berarti pedoman moral terkait sikap dan tingkah laku untuk menuntun masyarakat ke arah kebaikan).
 - E. etis moral yang menjadi pedoman pejabat negara dalam menjalankan pemerintahan.
(Pernyataan ini kurang tepat, karena 'etis' tidak berkaitan mengenai apa yang baik dan buruk, namun apa yang pantas. Kemudian berkaitan dengan pernyataan 'pedoman pejabat negara' juga kurang tepat karena seharusnya menjadi pedoman seluruh bangsa Indonesia).

Penjelasan tambahan:

Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar berperilaku untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Hal ini sama dengan Pancasila sebagai pandangan hidup yang dijadikan petunjuk dan pedoman kegiatan masyarakat Indonesia untuk mencapai kehidupan yang diinginkan. Pancasila sebagai sumber nilai juga berarti nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dijadikan sebagai cerminan dan pedoman dan berperilaku. Sebagai contoh, berkaitan dengan sila pertama, maka nilai yang dapat diambil sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari oleh masyarakat adalah tekun melaksanakan segala perintah agama dan tuhan yang sesuai dengan ajaran yang telah berlaku.

11. Ideologi Pancasila yang bersifat dinamis memberikan dampak positif terhadap perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia. Alasan bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai Ideologi terbuka karena ideologi Pancasila

A. sangat bersifat statis terhadap perubahan dan perkembangan zaman

(Jawaban salah. Pancasila sebagai dasar negara, sifatnya harus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dinamis berarti dapat menyesuaikan kebutuhan, sementara statis berarti kaku dan tidak fleksibel).

B. selalu berkembang sesuai dengan kepentingan dan tujuan penguasa

(Jawaban salah, karena Pancasila seharusnya berkembang sesuai dengan kepentingan dan tujuan bangsa Indonesia).

C. sangat terbuka terhadap seluruh dampak negatif perkembangan jaman

(Jawaban salah, meskipun Pancasila adalah ideologi terbuka, namun Pancasila seharusnya dapat terbuka pada dampak positif yang sesuai dengan kepribadian bangsa saja).

D. bersifat terbuka terhadap masuknya pengaruh positif perkembangan jaman

(Jawaban D adalah jawaban yang berbanding terbalik dengan jawaban C. Ini adalah jawaban yang paling tepat).

E. bersifat statis dan bersifat dinamis terhadap perubahan dan perkembangan jaman

(Sebuah ideologi agar terus relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman, seharusnya memiliki sifat dinamis saja).

Penjelasan tambahan:

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menurut Dr. Arifian memenuhi persyaratan kualitas tiga dimensi, yaitu dimensi realita (bahwa nilai-nilai dasar di dalamnya bersumber dari nilai riil dalam masyarakat), dimensi idealisme (yaitu Pancasila telah memberikan harapan, cita-cita masa depan yang lebih baik), dan dimensi fleksibilitas (yaitu Pancasila dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya). Dimensi fleksibilitas ini kemudian mengandung tiga hal yaitu nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis.

12. Indonesia mempunyai dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Kelima sila Pancasila hanya dapat ditemukan secara utuh dalam dasar negara Indonesia . Fakta ini menunjukkan bahwa

A. materi yang terdapat dalam Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa –bangsa di dunia
(Jawaban ini kurang tepat, karena Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia).

B. materi Pancasila begitu agung hingga tidak ada satu bangsa pun yang mampu menandinginya

(Jawaban ini salah. Pernyataan B ini malah justru mengimplikasikan sikap chauvinism yang tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-2 yaitu terkait dengan hak asasi manusia atau hak yang menganggap bahwa seluruh bangsa di dunia ini setara).

- C. muatan materi dalam dasar negara sangat dipengaruhi kultur budaya masyarakat
(Jawaban ini yang paling tepat, karena kelima dasar Pancasila secara utuh memang hanya ditemukan di Indonesia, hal ini karena materi dalam penyusunan Pancasila digali dari budaya masyarakatnya).
- D. Pancasila bisa menjadi dasar negara paling ideal untuk dilaksanakan
(Jawaban ini benar, namun kurang tepat).
- E. para perumus dasar negara mempunyai pandangan visioner
(Jawaban ini juga kurang tepat, karena dalam penyusunannya Pancasila disusun atas kesepakatan Bersama para pendiri bangsa dengan menggali nilai budaya local, serta membutuhkan proses yang panjang agar setiap sila-sila di dalamnya dapat disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia).

Pancasila hanya dapat ditemukan secara utuh dalam dasar negara Indonesia memiliki makna kelima dasar dalam Pancasila hanya dapat ditemukan dalam diri masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila yang sifatnya universal dan bisa saja relevan dengan bangsa lain, tidak serta merta membuat kelima dasar nilai pancasila bisa ditemukan di tempat lain secara utuh. Hal ini karena Pancasila dibuat dan digali dari nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri.

13. Sebagai suatu ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga nilai-nilai yang dikandung tidak bersifat statis tetapi dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman, inilah makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman meliputi nilai instrumental dan praksis, yang dimaksud nilai instrumental adalah

- A. sistem politik negara yang sedang berjalan.
(ini termasuk ke dalam nilai praksisnya)
- B. sistem pemerintahan dengan diikuti sistem multipartai.
(ini termasuk ke dalam nilai praksisnya)
- C. peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
(jawaban benar, nilai instrumental adalah peraturan yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah).
- D. sikap saling hormat menghormati antar masyarakat yang berbeda latar belakang.
(ini termasuk ke dalam nilai praksisnya)
- E. partisipasi rakyat dalam memberi kritikan dan masukan pada kekuasaan pemerintah.

(ini termasuk ke dalam nilai praksisnya)

Penjelasan:

Nilai Instrumental dan praksis adalah pendapat dari Dr. Alfian yang membagi dimensi fleksibilitas dalam Pancasila menjadi tiga hal: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

- Nilai dasar: adalah nilai yang mempunyai sifat tetap, nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
- Nilai instrumental: adalah penjabaran dari nilai dasar yang dijabarkan dalam bentuk UUD 1945 dan undang-undangnya yang juga meliputi TAP MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keppres, Perda, dan lain sebagainya.
- Nilai Praksis: adalah penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental berupa Tindakan nyata, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumentalnya.

14. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya luar sulit dibendung. Kemajuan teknologi informatika mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antar masyarakat dunia. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta sulit dikontrol. Berikut ini yang merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang sosial budaya adalah

A. Semakin mudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualis, konsumerisme, dan permisif.

(Jawaban ini benar, yaitu ancaman yang bisa saja terjadi sebagai dampak dari globalisasi di bidang sosial budaya).

B. Semakin maraknya penyeludupan narkoba, imigran gelap masuk ke Indonesia.

(Jawaban kurang tepat, peristiwa ini lebih kepada dampak negatif dari adanya globalisasi, yaitu dunia yang tanpa batas karena perdagangan bebas dapat dilakukan oleh siapa saja dari belahan bumi manapun kepada siapapun).

C. Semakin mudahnya kita mendapatkan informasi di bidang apa saja dengan kecanggihan teknologi informatika.

(Jawaban ini salah, karena tidak mengandung ancaman di bidang sosial budaya sama sekali. Justru kemudahan semacam ini dapat menjadi peluang untuk kemajuan bangsa).

D. Semakin maraknya perdebatan antar elit-elit politik yang berdampak pada menipisnya kepercayaan masyarakat kepada elit politik.

(Jawaban ini bukan ancaman dalam bidang sosial budaya, namun lebih kepada dampak secara politik).

- E. Semakin terpuruknya pendapatan pengusaha kecil di Indonesia, karena tidak mampu bersaing harga dengan produk luar
(Jawaban ini adalah ancaman di bidang ekonomi).
15. Pada hakikatnya ancaman dalam kebhinnekaan yang berdimensi politik dan bersumber dari dalam negeri dapat berupa ...
- A. pengerahan massa, provokasi, blockade politik hingga tindakan separatism
(Jawaban benar. Pengerahan massa, provokasi, blockade politik, hingga separatism merupakan ancaman serius kebhinnekaan yang berdimensi politik dan bersumber dari dalam negeri).
- B. pengaruh gaya hidup kebarat-baratan (westernisasi)
(Jawaban salah, karena ini adalah ancaman di bidang budaya yang bersumber dari luar negeri).
- C. penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa
(Jawaban salah karena ini adalah dampak atau konsekuensi yang bisa barakibat ancaman maupun peluang).
- D. tidak mencintai budaya sendiri
(Jawaban ini salah karena merupakan ancaman kebhinneakaan yang berdimensi budaya).
- E. agresi/invasi, pelanggaran wilayah dan pemberontakan bersenjata
(Jawaban ini kurang tepat. Agresi/invasi, pelanggaran wilayah, dan pemberontakan bersenjata merupakan ancaman dalam kebhinnekaan yang berdimensi politik, namun sumbernya dari luar negeri).
16. Pada kenyataannya suatu negara pasti memiliki sebuah kontitusi yang mengatur tentang praktek kehidupan kenegaraan dan melindungi segenap hak-hak asasi warga negaranya. Konstitusi merupakan obyek penting yang terkandung dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi....
- A. mengatur penerapan pemisahan kekuasaan antarlembaga-lembaga negara
(Jawaban benar, namun tidak lengkap karena konstitusi tidak hanya mengatur penerapan pemisahan kekuasaan antarlembaga-lembaga negara saja).
- B. mengatur bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis
(Jawaban benar, namun tidak lengkap karena konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis saja).
- C. merupakan kesepakatan mayoritas pemegang suara terbanyak di parlemen

(Jawaban salah, karena konstitusi bukan kesepakatan mayoritas pemegang suara terbanyak dalam parlemen. Namun lebih kepada Keputusan Bersama yang mewadahi kondisi dan kebutuhan seluruh masyarakat dalam suatu negara).

- D. menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak asasi dari warga negaranya

(Jawaban benar, namun tidak lengkap karena konstitusi tidak hanya mengatur jaminan terpenuhinya seluruh hak-hak asasi warga negaranya saja).

- E. merupakan kesepakatan tentang format kelembagaan organisasi negara

(Jawaban yang lebih masuk akal dan paling benar. Karena faktanya konstitusi memang kesepakatan terkait dengan bentuk kelembagaan seluruh instansi di suatu negara, mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, system pemerintahan, institusi negara, hingga tata cara menjalankan sebuah negara).

Penjelasan tambahan:

Konstitusi sendiri dapat dimaknai sebagai keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.

17. Salah satu makna dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV adalah bahwa negara bertujuan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diwujudkan melalui....

- A. penerapan sistem pengawasan keuangan

(Jawaban kurang tepat karena system pengawasan keuangan bukan hal yang dapat diwujudkan untuk kesejahteraan umum).

- B. pelaksanaan sistem perwakilan

(Jawaban salah, karena system perwakilan berhubungan dengan demokrasi dan merupakan pemenuhan hak politik, bukan kesejahteraan yang sifatnya materialistik).

- C. peningkatan Pendidikan

(Jawaban benar, namun kesejahteraan umum seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan Pendidikan saja, namun juga fasilitas pendukungnya serta aspek bidang yang lainnya).

- D. pelaksanaan otonomi daerah secara penuh

(Jawaban salah, meskipun Indonesia menganut asas otonomi daerah yang seluas-luasnya, namun tidak semua permasalahan dapat diatur oleh pemerintah daerah secara penuh. Ada beberapa aspek seperti Pendidikan, agama, hukum, dan kebijakan fiskal negara yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat).

- E. pelaksanaan pembangunan nasional

(Jawaban singkat ini benar, karena pelaksanaan Pembangunan nasional adalah pemenuhan dari kesejahteraan umum yang sifatnya materialistic dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya).

Penjelasan:

Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV memiliki makna mengisi kemerdekaan. Alinea IV ini juga berisi prinsip-prinsip negara, diantaranya adalah:

- tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara;
- ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar;
- bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat; dan
- dasar negara, yaitu Pancasila.

Adapun tujuan negara yang tercantum dalam Alinea IV tersebut diantaranya adalah:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- Memajukan kesejahteraan umum,
- Mencederaskan kehidupan bangsa,
- Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

18. Sebagai warga negara Indonesia kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika adalah

A. menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia

(Jawaban benar dan paling bisa menjawab kemauan soal. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa memiliki fungsi yang lebih luas dengan tujuan satu yaitu persatuan dan kesatuan bangsa).

B. sebagai pedoman untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing

(Jawaban salah, fokus pengembangan kebudayaan daerah masing-masing justru akan berdampak pada ketidakstabilan hubungan sosial antarmasyarakat karena masing-masing akan menonjolkan perbedaan kebudayaannya).

C. menjadi landasan dalam berperilaku antarsuku bangsa yang berbeda-beda

(Jawaban benar, namun kurang tepat karena Bhinneka Tunggal Ika seharusnya tidak hanya dijadikan landasan berperilaku antarsuku yang berbeda saja, namun juga dijadikan sebagai motivasi persatuan bangsa).

- D. sebagai pedoman menyusun amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945
(Jawaban benar namun kurang tepat. Amandemen UUD NRI 1945 memang dalam penyusunannya perlu memperhatikan aspek keberagaman bangsa, namun itu bukan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan amandemen UUD NRI 1945).
- E. menjadi landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka
(Jawaban salah karena gak nyambung).

19. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Mencapai masyarakat adil dan makmur;
- (2) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- (3) Memajukan kesejahteraan umum;
- (4) Mencederaskan kehidupan bangsa.

Negara Indonesia dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti ditunjukkan pada pernyataan nomor ...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (1), (3), dan (4)
- D. (2), (3), dan (4)
- E. Semuanya benar

Penjelasan:

Berikut tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV tersebut:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- Memajukan kesejahteraan umum,
- Mencederaskan kehidupan bangsa,
- Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

20. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Tujuan negara yang akan diwujudkan dalam oleh pemerintah Negara;
- (2) Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar;
- (3) Bentuk pemerintahan;
- (4) Dasar Negara;
- (5) Perjuangan bangsa sudah mencapai tingkat yang menentukan;
- (6) Motivasi spiritual.

Prinsip-prinsip negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditunjukkan nomor ...

- A. A. (1), (2), (3), dan (4)
- B. B. (1), (3), (4), dan (5)
- C. C. (2), (3), (4), dan (5)
- D. D. (3), (4), (5), dan (6)
- E. E. Semuanya benar

Penjelasan:

Prinsip-prinsip negara Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

- tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara;
- ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar;
- bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat; dan
- dasar negara, yaitu Pancasila.

21. Berikut contoh implementasi nilai Pancasila

- 1) Pemilihan kepala desa dilakukan serentak
- 2) Made bersama keluarga beribadat di pura
- 3) Para pemuda sukses mengikrarkan "Sumpah Pemuda"
- 4) Pemerintah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan
- 5) Ayub memperlakukan orang tuanya yang sedang sakit dengan baik.

Apabila implementasi nilai Pancasila disusun secara hierarkis, susunan yang benar ditunjukkan oleh nomor

- A. 4), 2), 3), 1) dan 5)
- B. 3), 4), 5), 2) dan 1)
- C. 3), 1), 4), 5) dan 2)
- D. 2), 5), 3), 1) dan 4)
- E. 1), 4), 3), 5) dan 2)

Penjelasan:

Soal di atas ingin kita Menyusun contoh-contoh implementasi nilai Pancasila secara hierarkis atau secara berurutan dari bentuk paling sederhana atau kecil ke bentuk paling besar. Jawabannya sebagai berikut:

2) Made bersama keluarga beribadat di pura

5) Ayub memperlakukan orang tuanya yang sedang sakit dengan baik.

3) Para pemuda sukses mengikrarkan "Sumpah Pemuda"

1) Pemilihan kepala desa dilakukan serentak

4) Pemerintah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan

22. Perhatikan gambar di bawah ini!



Berdasarkan Skema Kekuasaan Negara RI Lembaga-Lembaga Negara di atas pemegang kekuasaan legislatif dan konstitutif adalah....

- A. BPK dan Presiden
- B. DPR dan MPR
- C. MPR dan DPD
- D. MA dan MK
- E. MPR dan Presiden

Penjelasan:

Soal ini menyangkut materi trias politika yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif (di Indonesia sendiri ditambah dengan kekuasaan eksaminatif yaitu BPK).

- Legislatif adalah kekuasaan lembaga dalam membuat peraturan perundang-undangan, di Indonesia legislative dipegang oleh DPR, DPD, DPRD, dan MPR.
- Eksekutif adalah kekuasaan lembaga dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini dipegang oleh presiden beserta para menternya serta kepala daerah di bawahnya.
- Yudikatif adalah kekuasaan lembaga dalam penegakan hukum dan memastikan undang-undang dijalankan dengan benar. Lembaga ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

- Eksaminatif adalah kekuasaan lembaga dalam melakukan pemeriksaan keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.
23. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 setiap Lembaga-Lembaga Negara mempunyai tugas, dan kewenangan masing-masing. Lembaga Negara yang antara lain mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat/memutuskan perkara pada tingkat kasasi, adalah ...
- A. **Mahkamah Agung**
 - B. Kejaksaan Agung (adalah institusi penuntutan bukan memutuskan perkara)
 - C. Mahkamah Konstitusi (institusi ini memutuskan sengketa pemilu, pembubaran partai politik, pengujian undang-undang terhadap UUD. Serta merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung).
 - D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (adalah lembaga legislative yang tidak memiliki kewenangan yudikatif).
 - E. Dewan Perwakilan Rakyat (adalah lembaga legislative yang tidak memiliki kewenangan yudikatif).

Penjelasan:

Tugas dan kewenangan dalam memutuskan perkara pada Tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung. Hal ini tercantum dengan jelas pada Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Perkara pada Tingkat kasasi ini berarti jika sudah diputus oleh MA dan jika hasilnya tidak diterima oleh pemohon kasasi, tidak bisa dimintakan banding lagi ke pengadilan yang lebih tinggi, karena MA adalah badan peradilan tertinggi di Indonesia. Berbeda dengan tingkat kasasi, di bawahnya masih ada Tingkat banding, yaitu pengajuan gugatan hasil pengadilan yang dianggap tidak memenuhi kepuasan salah satu pihak. Sebagai contoh, dalam sengketa Perusahaan antara seorang mantan karyawan Perusahaan X melawan Perusahaan X. Kasus mereka akan disidang di Pengadilan Negeri. Jika hasilnya tidak memuaskan mantan karyawan, dia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Oleh Pengadilan Tinggi kasus tersebut akan ditinjau lagi dan akan diputus diterima gugatannya atau ditolak. Setelah itu, jika hasil Keputusan Pengadilan Tinggi tidak juga memuaskan mantan karyawan, Upaya terakhir dia bisa mengajukan gugatan kasasi ke MA.

24. Hubungan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, artinya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, disebut

- A. Asas Desentralisasi
- B. Asas Sentralisasi
- C. Asas Otonomi Daerah
- D. Asas Dekonsentrasi
- E. Asas Tugas Pembantuan

Penjelasan:

Asas Desentralisasi: Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 angka 8 UU 23/2014 jo. UU 1/2022).

Asas Sentralisasi: Asas sentralisasi adalah prinsip di mana wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dipusatkan pada pemerintah pusat. Asas sentralisasi yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Asas Otonomi Daerah: Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu.

Asas Dekonsentrasi: Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Pasal 1 angka 9 UU 23/2014 jo. UU 1/2022).

Asas Tugas Pembantuan: Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Pasal 1 angka 11 UU 23/2014 jo. UU 1/2022).

25. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 setiap Lembaga-Lembaga Negara mempunyai tugas, dan kewenangan masing-masing. Lembaga Negara yang antara lain mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, adalah

- A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- B. Mahkamah Konstitusi

- C. Kejaksaan Agung
- D. Mahkamah Agung
- E. Dewan Perwakilan Rakyat

Penjelasan:

Pengujian materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah tugas dari Mahkamah Agung, seperti yang tercantum dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Sementara kewenangan pengujian materi undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

26. Perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perhatikan Pasal-pasal UUD NRI 1945 berikut ini:

- 1. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945
- 2. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945
- 3. Pasal 28 ayat (5) UUD NRI 1945
- 4. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945
- 5. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945
- 6. Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945

Yang termasuk perlindungan hukum bagi warga Negara adalah...

- A. 1,2,4, dan 5
- B. 1,2,3, dan 6
- C. 1,3,4, dan 6
- D. 1,2,4, dan 6
- E. 2,4,5 dan 6

Penjelasan:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: **benar** (Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.)

2. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945: **benar** (Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.)

3. Pasal 28 ayat (5) UUD NRI 1945: **tidak ada Pasal 28 ayat (5) UUD NRI 1945**

4. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945: **benar** (Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.)

5. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945: **benar** (Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.)

6. Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945: **salah** (Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.)

27. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia, berikut ini adalah contoh penegakkan dan perlindungan hukum dilingkungan masyarakat adalah...

- 1) Di wilayah perbatasan RI dan Malaysia adanya perlindungan warga negara di sana agar tetap aman dan tidak menimbulkan konflik di perbatasan
- 2) Melindungi para TKI yang berada di luar negeri yang tersangkut masalah dan dirundingkan untuk pembelaan
- 3) KPK menangkap para koruptor dan menegakkan hukum sesuai undang-undang
- 4) Satuan polisi lalu lintas melakukan operasi patuh jaya disepanjang jalan protokol dan meminta uang tebusan
- 5) Satgas organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pemilihan umum

Dari data di atas yang benar adalah...

- A. 1,2 dan 3
- B. 1,3 dan 4
- C. 2,3 dan 4
- D. 2,3 dan 5
- E. 3,4 dan 5

Penjelasan:

Dari lima pernyataan di atas, dua dari lima tidak menunjukkan contoh penegakan dan perlindungan hukum di lingkungan masyarakat, lebih kepada pengawasan hukum di lingkungan masyarakat, yaitu nomor 4 (Satuan polisi lalu lintas melakukan operasi patuh jaya disepanjang jalan protokol dan

meminta uang tebusan) dan 5 (Satgas organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pemilihan umum).

28. Integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi dan budaya. Berikut ini faktor pembentuk integrasi nasional sebagai berikut:

- 1) Adanya konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan UUD NRI 1945 (benar, consensus nasional dapat menjadi factor persatuan bangsa Indonesia)
- 2) Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan faktor pengalaman Sejarah (benar, perasaan senasib dan sepenanggungan dapat membuat bangsa Indonesia merasa saling mengerti satu sama lain dan meningkatkan persatuan bangsa)
- 3) Adanya keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa Indonesia sebagaimana sumpah pemuda 28 Oktober 1928 (benar, Sumpah Pemuda merupakan satu peristiwa yang menjadi cikal bakal persatuan bangsa karena isi dalam sumpahnya berisi integrasi menjadi satu bangsa, tanah air, dan Bahasa)
- 4) Masih besarnya ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga menimbulkan rasa tidak puas bangsa Indonesia (**salah**, ketidakmerataan Pembangunan malahan justru dapat merusak integritas atau persatuan bangsa karena akan menimbulkan kecemburuan sosial)
- 5) Adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. (benar, Pancasila mengandung kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang dapat menjadi sarana integritas bangsa)

Faktor pembentuk integrasi nasional yang tepat adalah...

- A. 1,2 dan 3
- B. 1,3 dan 4
- C. 1,4 dan 5
- D. 1,2 dan 4
- E. 3,4 dan 5

29. Dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya secara instan. Hal tersebut merupakan pengaruh negatif IPTEK di bidang.....

- A. ideologi
- B. **ekonomi**
- C. politik

- D. sosial budaya
- E. pertahanan dan keamanan

Penjelasan:

Cukup jelas.

30. Persatuan dan Kesatuan bangsa menjadi modal utama dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar, bentuk upaya pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan NKRI adalah :

- 1) Dalam pasal 37 UUD NRI 1945 Bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah
 - 2) Adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara
 - 3) Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan
 - 4) Memerbolehkan berdirinya kerajaan-kerajaan baru di NKRI
 - 5) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD NRI 1945
- A. 1, 2, 3 dan 4
 - B. 2, 3, 4 dan 5
 - C. 1, 3, 4 dan 5
 - D. 1, 2, 4 dan 5
 - E. 1, 2, 3 dan 5

Penjelasan:

Pendirian Kerajaan-kerajaan baru yang tidak diakui oleh pemerintah dapat menjadi pintu gerbang dari disintegrasi bangsa karena berkurangnya rasa persatuan menjadi satu bangsa Indonesia. Pendirian Kerajaan-kerajaan juga berpotensi dalam memupuk rasa primordialisme dan etnosentrisme.

31. Untuk menghindari sistem pemerintahan yang absolut atau otoriter dalam praktik ketatanegaraan, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang ditujukan sebagai upaya untuk...

- A. Terjalinya kerjasama antara lembaga pemerintahan seluas luasnya
(salah, karena Kerjasama antara lembaga pemerintah seluas-luasnya justru akan menghasilkan tata Kelola pemerintahan yang absolut dan otoriter. Kewenangan lembaga pemerintah harus dibatasi dan diawasi).
- B. Menghasilkan kebijakan yang menguntungkan lembaga lembaga Negara
(salah, menguntungkan lembaga negara justru akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sehat dan tidak melihat pada realitas masyarakat yang ada. Juga kebijakan

seharusnya menguntungkan masyarakat secara luas bukan hanya beberapa golongan kelompok saja).

- C. Menghemat anggaran karena masing-masing lembaga Negara menjadi satu kordinasi (salah, jika lembaga negara menjadi satu koordinasi bukan tidak mungkin akan terjadi pemerintahan yang otoriter karena semuanya terpusat pada satu pemimpin, serta antar lembaga akan sulit saling mengawasi satu sama lain).
- D. Mewujudkan konsep kekuasaan Negara eksekutif, legislative dan fedartif (salah, negara Indonesia berbentu kesatuan bukan federative).
- E. Terjadinya kontrol dan keseimbangan antara lembaga pemegang kekuasaan (benar, dengan adanya hubungan control dan keseimbangan antarlembaga pemegang kekuasaan maka akan meminimalisir penyimpangan lembaga negara. Sebagai contoh dalam penegakan hukum, antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan maupun badan Kehakiman harus memiliki hubungan control saling mengawasi. Masing-masing memiliki tugasnya dan saling berhubungan satu dengan lainnya untuk menciptakan hukum yang adil).

32. Perhatikan pernyataan di bawah ini, yang termasuk upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI adalah :

- 1) Sebagai WNI menuntut hak terlebih dahulu (**salah**, harus ada keseimbangan antara penuntutan hak dan melakukan kewajiban sebagai warga negara).
- 2) Menjalankan Pancasila dengan murni dan konsekuen (**benar**, sebagai warga negara menjalankan Pancasila dengan murni dan konsekuen dapat berpengaruh pada pertahanan persatuan dan kesatuan negara).
- 3) Menjalankan UUD NRI 1945 dengan baik (**benar**, sebagai warga negara yang baik, UUD NRI 1945 bisa menjadi tuntunan dalam ikut berpartisipasi pada pertahanan dan persatuan kesatuan NKRI).
- 4) Belajar dengan baik (**benar**).
- 5) Menjalankan kewajiban sebagai WNI (**benar**).

Dari uraian di atas jawaban yang paling tepat adalah.....

- A. 1,2,3 dan 4
- B. 2,3,4 dan 5
- C. 3,4,5 dan 1
- D. 4,5,1 dan 2
- E. 5,1,2 dan 3

33. Unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber daya alam di dalamnya adalah...

- A. wilayah kedaulatan
- B. wilayah negara
- C. wilayah ekstrateritorial
- D. wilayah teritorial
- E. wilayah bangsa

Penjelasan:

Wilayah teritorial adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan hukum dan kedaulatan negara. Ini mencakup:

- Wilayah darat: Kawasan daratan yang termasuk dalam wilayah negara.
- Wilayah perairan: Perairan internal (seperti sungai, danau, dan perairan yang terletak di dalam batas garis dasar), laut teritorial (sepanjang 12 mil laut dari garis dasar), dan zona tambahan.
- Wilayah udara: Ruang udara di atas wilayah darat dan perairan, serta wilayah udara di atas kapal dan pesawat terbang yang membawa bendera negara tersebut.

34. Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki hak dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perhatikan pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Kehidupan di bidang politik misalnya memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum
- 2) Kewenangan di bidang pendidikan misalnya memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karier pendidikan, hak mendirikan lembaga pendidikan swasta
- 3) Kewenangan di bidang ekonomi misalnya warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak, memiliki barang dan berusaha
- 4) Kewenangan di bidang sosial budaya setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, pengembangan bahasa, adat istiadat dan mendirikan lembaga sosial
- 5) Kewenangan dalam bidang pertahanan, warga negara dapat bebas memiliki senjata untuk membela negara (**salah**, dalam hukum yang berlaku di Indonesia kepemilikan senjata terutama senjata api oleh masyarakat sipil sangat dibatasi dan tidak bisa sembarangan

individu memilikinya. Adapun pengaturan terkait dengan kepemilikan senjata api oleh sipil tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 tahun 2004 dan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015).

- 6) Kewenangan di bidang demokrasi setiap warga negara berhak dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi yang berkembang tidak hanya memajukan sistem demokrasi Pancasila

Dari pernyataan di atas yang benar adalah....

- A. 1,2,3 dan 4
- B. 1,3,4 dan 5
- C. 2,3,4 dan 5
- D. 2,4,5 dan 6
- E. 3,4,5 dan 6

Penjelasan:

Jawaban salah hanya pada pernyataan nomor 5, oleh karena itu pilihan yang mengandung nomor 5 salah.

35. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman separatis ditunjukkan dengan banyaknya wilayah negara yang ingin merdeka dan lepas dari NKRI. Ancaman yang datang dari para provokator yang membuat keonaran dan tidak stabil kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini berbagai macam ancaman yang ada bagi NKRI baik yang datang dari dalam maupun luar negeri :

- 1) agresi militer (berasal dari luar negeri, contoh Agresi Militer Belanda I dan II di tahun 1945 – 1949).
- 2) pelanggaran wilayah oleh negara lain (berasal dari luar negeri, contoh konflik perbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan konflik Laut Natuna dengan RRT).
- 3) konflik horizontal (berasal dari dalam negeri, konflik horizontal adalah konflik yang setara, misalnya antara warga masyarakat).
- 4) aksi kekerasan yang bernuansa SARA (berasal dari dalam negeri, misalnya konflik Poso dan lain sebagainya).
- 5) gerakan separatism (berasal dari dalam negeri, adalah Gerakan ekstrim yang ingin memisahkan diri dari NKRI, misalnya konflik KKB, Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, dan lain sebagainya).

- 6) Spionase (berasal dari luar negeri, adalah praktik pengintaian atau mata-mata untuk mengumpulkan informasi terkait negara lain yang dilakukan oleh organisasi atau negara lain secara ilegal dan tidak sah).
- 7) pengrusakan fasilitas public (berasal dari dalam negeri).
- 8) aksi teror jaringan internasional (berasal dari luar negeri, misalnya aksi terror yang dilakukan oleh organisasi Jemaah Islamiyah sebagai dalang dari beberapa insiden terorisme yang terjadi di Indonesia. JI beranggotakan tokoh-tokoh radikal dari beberapa negara ASEAN seperti Malaysia. Dalam kasus ini yang paling terkenal adalah WN Malaysia sebagai dalang Bom Bali, Bom JW Marriott, dan Bom Kedubes Australia, Noordin M Top).

Dari data tersebut yang termasuk ancaman dari luar negeri adalah...

- A. 1, 2, 3 dan 4
 - B. 1, 2, 6 dan 8
 - C. 2, 3, 4 dan 5
 - D. 3, 4, 5 dan 7
 - E. 4, 5, 6 dan 8
36. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya heterogen, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku yang menunjukkan mencintai persatuan dan kesatuan harus nampak dalam kehidupan sehari-hari seperti semboyan “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Perhatikan macam-macam perilaku dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa di bawah ini:
- 1) Menanamkan semangat etnosentrisme agar mau membangun daerahnya guna kesejahteraan rakyat di daerah seluruh Indonesia.
(salah, etnosentrisme sikap yang menganggap budaya sendiri sebagai standar utama untuk menilai budaya lain, dan cenderung meremehkan atau menganggap rendah budaya lain. Etnosentrisme ini akan membuat semangat kedaerahan meningkat dan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa).
 - 2) Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah
(benar).
 - 3) Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan
(benar).
 - 4) Meningkatkan pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
(benar).
 - 5) Melaksanakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah
(benar).

- 6) Menanamkan semangat provinsilisme agar mau membangun daerahnya guna kesejahteraan rakyat di daerah seluruh Indonesia
(salah, semangat provinsilisme malah justru akan meningkatkan semangat kedaerahan yang akan mengganggu stabilitas keutuhan negara).

Berdasarkan pernyataan di atas yang tepat adalah...

- A. 1,2,3 dan 4
- B. 1,2,3 dan 5
- C. 2,3,4 dan 5
- D. 2,3,4 dan 6
- E. 3,4,5 dan 6

37. Setiap warga Negara menginginkan kehidupan yang tentram dan damai yang memberikan rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Perhatikanlah beberapa pernyataan berikut :

- 1) Arogansi (sikap yang dapat menjadi ancaman ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat).
- 2) Keterbukaan (sikap yang baik dan bisa menjadi factor pendorong kehidupan bangsa yang tentram dan damai)
- 3) Politik Uang (politik uang dalam banyak kasus dapat menghancurkan Kesehatan demokrasi suatu negara dan pada akhirnya akan menyebabkan konflik yang mengganggu kehidupan bermasyarakat).
- 4) Demokratisasi (merupakan system pemerintahan yang baik dan perlu dipertahankan).
- 5) Perubahan ketatanegaraan (perubahan ketatanegaraan tidak selalu menjadi ancaman, apalagi dalam konteks suatu negara membutuhkan suatu kebaruan atau reformasi yang lebih baik untuk membangun ulang tata Kelola pemerintahannya yang sudah dianggap hancur).
- 6) Radikalisme dan teroris (Merupakan ancaman serius tidak hanya dalam bidang politik, namun juga keutuhan dan kelangsungan eksistensi negara)

Berdasarkan pernyataan tersebut, pengaruh yang menjadi ancaman dalam bidang politik ditunjukkan oleh nomor.....

- A. 1, 3 dan 4
- B. 2, 3 dan 5
- C. 1, 3 dan 6
- D. 3, 4 dan 6
- E. 4, 5 dan 6

38. Tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara sudah digariskan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut tidak akan optimal apabila tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Oleh karena itu peran serta rakyat dalam sistem politik Indonesia sangat penting. Salah satu contoh bentuk peran tersebut adalah

- A. berpartisipasi aktif dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik oleh pemerintah (benar).
- B. memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing (salah, memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal merupakan peran rakyat dalam keamanan dan ketertiban).
- C. menciptakan produk-produk yang kreatif dan inovatif sesuai dengan keahliannya. (salah karena menciptakan produk-produk yang kreatif dan inovatif merupakan peran rakyat dalam peningkatan ekonomi).
- D. mengkritisi setiap kebijakan yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. (tidak tepat, karena sebagai warga negara yang baik, baiknya kritik pada kebijakan pemerintah hanya pada kebijakan yang bermasalah dan merugikan saja. Tidak semua kebijakan perlu dikritisi).
- E. ikut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing (salah, ikut dalam usaha pembelaan negara merupakan peran rakyat dalam pertahanan dan keamanan).

39. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal-pasal-pasal. Penjabaran kalimat "... Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ..." pada Pembukaan tergambar dalam pasal

- A. 29 ayat (1)
- B. 27 ayat (1)
- C. 30 ayat (1)
- D. 30 ayat (2)
- E. 31 ayat (2)

Penjelasan:

Pasal 29 ayat (1): **benar** Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 27 ayat (1): **tidak tepat** Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 30 ayat (1): **tidak tepat** Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat (2): **tidak tepat** Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 31 ayat (2): **tidak tepat** Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

40. Dalam sidang tahunan MPR yang membahas amandemen UUD 1945 disepakati bahwa Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bentuk negara Indonesia tidak dapat diubah. Hal ini menegaskan kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai

A. pernyataan terperinci kemerdekaan Indonesia

(kurang tepat, Pembukaan UUD NRI 1945 tidak hanya berisi rincian pernyataan merdeka yang tertuang dalam alinea 3, namun secara berurutan berisi alasan merdeka, perjuangan kemerdekaan, pernyataan merdeka, serta mengisi kemerdekaan).

B. pokok kaidah negara yang kuat dan tetap (fundamental)

(jawaban yang lebih benar dibanding jawaban lain. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan pokok kaidah negara yaitu pernyataan kemerdekaan negara Indonesia, tujuan yang harus dicapai setelah Merdeka, serta dasar negara berupa Pancasila).

C. pokok-pokok pikiran yang inti sarinya adalah Pancasila

(kurang tepat, karena Pembukaan UUD NRI 1945 tidak hanya berisi Pancasila).

D. sumber tertib hukum yang bersifat hirarkis

(salah, sumber tertib hukum yang bersifat hierarki bukan Pembukaan UUD NRI 1945, namun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimulai dari UUD NRI 1945 sebagai peraturan paling tinggi, kemudian TAP MPR, kemudian UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya).

E. pokok-pokok pikiran yang akan dijabarkan dalam pasal-pasal

(kurang tepat, karena Pembukaan UUD NRI 1945 berisi tahap-tahapan kemerdekaan serta kaidah pokok negara Indonesia).

41. Di era globalisasi sekarang ini kita tidak dapat lepas dari pengaruh budaya bangsa lain. Sebagai warga negara yang baik dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka perwujudan sikap nilai praksis dalam menerima budaya asing adalah ...

- A. Meniru budaya asing
(kurang tepat, karena tidak semua budaya asing itu baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila).
- B. Menutup diri dari budaya asing
(Meskipun tidak dianjurkan meniru semua budaya asing, namun juga tidak dianjurkan dalam menutup diri dari budaya asing. Karena mungkin ada budaya asing yang dapat diadopsi dan sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga dapat menambah keberagaman budaya baru).
- C. Menolak dengan tegas budaya asing
(Sikap ini kurang tepat, seperti diketahui tidak semua budaya asing baik dan buruk. Kita harus tetap menerimanya dengan memilah mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila).
- D. Memilih sesuai dengan keinginan pribadi
(Sikap ini kurang tepat karena pemilihan budaya asing perlu didasarkan pada nilai Bersama yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila, tidak hanya terkait dengan keinginan pribadi saja).
- E. **Memilih sesuai dengan kepribadian bangsa**

Penjelasan:

Nilai Praksis adalah penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental berupa Tindakan nyata, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumentalnya. Jadi, nilai praksis dapat diartikan sebagai Tindakan, sikap, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertanyaan ini ditanyakan perwujudan nilai praksis dalam menerima budaya asing.

42. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu

- A. memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
(salah, usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian merupakan tugas dari presiden. Misalnya presiden mengusulkan pengangkatan A sebagai Kapolri, usul tersebut nantinya akan diurus oleh DPR, dapat disetujui atau ditolak, kemudian nantinya Presiden akan melakukan pengangkatan Kapolri: Pasal 11 UU No 2 Tahun 2002).
- B. melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
(salah, penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah justru melanggar prinsip demokrasi dan tidak boleh dilakukan).

- C. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
(jawaban ini benar, tapi tidak menjawab soal).
 - D. memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
(salah, bukan tugas kepolisian memutus perselisihan sengketa hasil pemilu, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi).
 - E. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
(jawaban ini benar, seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2002).
43. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar
- A. kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
(benar, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting guna kepastian dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Seperti tujuan utama dari hukum itu sendiri diciptakan yaitu untuk melindungi masyarakat).
 - B. menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
(salah, hukum bukan alat kekuasaan untuk para penguasa negara, melainkan system yang seharusnya melindungi warga negaranya dari segala bentuk ketidakadilan).
 - C. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
(Peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum memang penting, namun jawaban C tidak menjawab soal).
 - D. terciptanya persamaan di mata hukum antarwarga masyarakat yang homogen
(salah, karena seharusnya terciptanya persamaan di mata hukum antarwarga masyarakat yang heterogen).
 - E. terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum
(Jawaban ini benar, tapi tidak menjawab soal terkait dengan mengapa perlindungan dan penegakan hukum penting dilakukan).
44. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut !
- 1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas
(contoh ini merupakan ancaman negara di bidang sosial dan ekonomi).
 - 2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah
(contoh ini merupakan ancaman negara di bidang politik).
 - 3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat
(contoh ini merupakan ancaman negara di bidang sosial dan budaya).

- 4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa (contoh ini merupakan ancaman negara di bidang politik).
- 5) Pola perjuangan tindak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional.
(contoh ini merupakan ancaman negara di bidang politik).

Berdasarkan uraian beberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor

- A. (1), (2) dan (3)
 - B. (1), (3) dan (5)
 - C. (2), (3) dan (4)
 - D. (2), (4) dan (5)**
 - E. (3), (4) dan (5)
45. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah
- A. bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal (jawaban tidak ada hubungannya dengan cerminan komitmen kebhinnekaan bangsa Indonesia)
 - B. bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah (salah, kita tidak boleh bekerjasama dalam segala bidang kehidupan hanya dengan suku, agama, dan daerahnya sendiri).
 - C. membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya (kurang tepat, seharusnya membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di seluruh wilayah Indonesia).
 - D. bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa (benar, sikap ini merupakan sikap menghargai semua suku).**
 - E. meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan (salah, semangat kedaerahan bukan cerminan komitmen kebhinnekaan bangsa Indonesia).
46. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Oleh sebab itu berbagai ancaman mengganggu kedaulatan bangsa dan negara. Ancaman tersebut diantaranya adalah ancaman dalam bidang ideologi. Berikut ini yang bukan merupakan strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah

- A. ideologi harus dijadikan tombak bangsa dalam menghadapi unsur yang masuk dari luar (benar, ideologi harus dijadikan ujung tombak dalam menghadapi unsur yang masuk dari luar, misalnya dipakai sebagai control dan saringan budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia).
 - B. ideologi harus diaktualisasikan kepada seluruh bidang kenegaraan (benar, ideologi harus diaktualisasikan ke seluruh bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara).
 - C. ideologi Indonesia haruslah mengarah pada arah yang dinamis dan actual (benar ideologi haruskan dinamis dan actual, sehingga terus relevan dan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara).
 - D. ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa harus ditanamkan dalam pendidikan seluruh warga negara Indonesia (benar, ideologi hendaknya dipakai sebagai pemersatu dan perekat bangsa dalam hal ini untuk mempertahankan inetgritas bangsa).
 - E. ideologi harus duterapkan dalam pemerintahan secara absolut (tidak tepat karena ideologi tidak boleh diterapkan dalam pemerintahan secara absolut. Pemerintahan absolut hanya akan menciderai ideologi itu sendiri dan demokrasi).
47. Salah satu bentuk pengamalan yang terkandung dari pokok pikiran Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea ke-2 adalah
- A. tidak melakukan diskriminasi dengan bersikap merendahkan harkat orang lain
 - B. mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat
 - C. keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
 - D. belajar dengan tekun sebagai dukungan untuk terwujudnya tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa
 - E. memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus di isi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur

Penjelasan:

Sebagai informasi berikut isi dari Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke dua:

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Maksud dari Alinea kedua ini adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan tujuan yang akan selesai begitu saja. Kemerdekaan menurut Alinea kedua merupakan awal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang Merdeka, Bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur.

Sebagai Gambaran berikut pokok pikiran masing-masing Alinea berkaitan dengan Pancasila:

Alinea 1 - sila 3

Alinea 2 - sila 5

Alinea 3 - sila 4

Alinea 4 - sila 1 dan 2

48. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di dalamnya memuat tujuan nasional yang akan diwujudkan oleh setiap pemegang kekuasaan. Tujuan nasional Indonesia yang terkait dengan upaya penegakkan hukum tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang bersalah adalah

A. melindungi segenap bangsa Indonesia.

(Tujuan nasional Indonesia yang terkait dengan Upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia).

B. memajukan kesejahteraan umum.

(Tujuan nasional ini merupakan Upaya untuk mensejahterakan masyarakat secara ekonomi).

C. mencerdaskan kehidupan bangsa.

(Tujuan nasional ini merupakan Upaya dalam bidang Pendidikan)

D. menciptakan ketertiban umum.

(Tujuan nasional ini merupakan Upaya dalam bidang keamanan)

E. ikut melaksanakan ketertiban dunia.

(Tujuan nasional ini merupakan Upaya dalam bidang pertahanan)

49. Perhatikan wewenang dibawah ini!,

(1). Pendidikan,

(2). Moneter/fiskal,

(3). Kebudayaan,

(4). Hubungan luar negeri,

(5). Pertahanan dan keamanan.

Pernyataan diatas yang tidak termasuk kewenangan pemerintah daerah ada pada nomor

A. 1, 2, dan 3

- B. 2, 3, dan 5
- C. 1, 2, dan 4
- D. 2, 4, dan 5
- E. 3, 4, dan 5

Penjelasan:

Kewenangan pemerintah daerah sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah di Indonesia dilakukan seluas-luasnya, namun tidak semua bidang dapat diurus oleh pemerintah daerah. Setidaknya ada tiga bidang yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu Pendidikan, Agama, Moneter/Fiskal, hubungan dengan luar negeri, dan pertahanan dan keamanan.

50. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara dan tidak dapat diganggu gugat sedangkan kepala Pemerintahan berada ditangan perdana menteri merupakan ciri dari bentuk pemerintahan

- A. monarki konstitusi
- B. monarki parlementer
- C. republik konstitusional
- D. republik absolut
- E. republic parlementer

Penjelasan:

Sebuah negara yang memiliki presiden dan perdana menteri merupakan negara dengan bentuk pemerintahan republic dan system pemerintahan parlementer, sementara bentuk negaranya bisa kesatuan dan bisa juga federal.

Dalam negara yang memiliki presiden dan perdana Menteri, masing-masing memegang kekuasaan dan kewenangannya masing-masing. Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.

Contoh negara dengan system ini adalah Singapura. Negara ini berbentuk Kesatuan Parlementer Partai Dominan Republik Konstitusional, dengan presidennya Tharman Shanmugaratnam dan Perdana Menterinya Lawrence Wong. Presiden di pilih secara langsung oleh rakyat dan Perdana Menteri dipilih oleh parlemen hasil pemilu.